

## **PROVUS'S DISCREPANCY EVALUATION MODEL PADA PENDIDIKAN INKLUSI**

Oleh: Yohanes Subasno<sup>\*)</sup>

### **A. PENDAHULUAN**

Pada jenjang dan satuan apapun, penyelenggaraan pendidikan selalu berkaitan dengan adanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian elementer dari pengelolaan atau manajemen pendidikan. Ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lain, dan bahkan saling tergantung. Bahkan ada yang secara sederhana mengatakan, apabila perencanaan pendidikan dilakukan dengan baik, maka dalam pelaksanaannya pun akan dapat berjalan dengan baik pula, sehingga evaluasi pun akan merepresentasikan hasil yang baik pula.

Penulis memberi perhatian pada praktek pendidikan inklusif, yang merupakan model pendidikan untuk memberikan kesempatan sekaligus alternatif pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Terlepas dari polemik dan kontroversi yang muncul terkait dengan kemunculan model ini, namun di masyarakat model pendidikan tersebut telah dipraktikkan dengan berbagai versi. Penulis melihat bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan yang secara konseptual sangat ideal namun perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi tersebut menjadi sangat penting untuk memberikan informasi kepada para praktisi pendidikan inklusi, agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk keberlangsungan penerapan konsep pendidikan tersebut. Pemilihan model evaluasi yang tepat untuk digunakan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan inklusi tidaklah selalu mudah. Hal itu

disebabkan oleh karena pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang masih relatif baru.

Tulisan jurnal kajian ini, memilih *Discrepancy Model Evaluation* dengan tujuan yang sangat umum, yakni bermaksud membandingkan antara konsep inklusi sebagai suatu model pendidikan yang ideal, dengan kenyataan yang telah dilakukan oleh para praktisi pendidikan inklusi, yang meng-enrole siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler. Sebagai sebuah kajian, maka tulisan ini bersifat asumptif dan sangat terbuka untuk memperoleh berbagai masukan bahkan sanggahan, apabila dari sudut pandang yang tertentu dianggap tidak relevan atau tidak memiliki relevansi ilmiah.

## **B. PROVUS'S DISCREPANCY EVALUATION MODEL**

*Discrepancy Model Evaluation* (DEM), jika diterjemahkan kata demi kata menjadi 'evaluasi model ketidaksesuaian'. Namun dalam kancan evaluasi program pendidikan, model ini dikenal dengan nama Evaluasi Kesenjangan Program. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Provus Tahun 1971, dan oleh karenanya sering kali model ini disebut sebagai *Provus's Discrepancy Model Evaluation* atau disingkat menjadi Provus's DEM.

Menurut Malcolm Provus, evaluasi adalah proses yang terdiri dari tiga hal, yakni:

- ❖ Menyetujui berdasarkan standar (istilah lain yang digunakan secara bergantian dengan istilah tujuan);
- ❖ Menentukan apakah ada kesenjangan antara kinerja aspek-aspek program dengan standar kinerja yang ditetapkan;
- ❖ Menggunakan informasi tentang kesenjangan-kesenjangan yang ditemukan sebagai bahan untuk meningkatkan, mengelola, atau

bahkan mengakhiri program atau salah satu aspek dari program tersebut.

Kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Evaluasi kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara *standard* yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut.

### **Langkah-Langkah dalam Evaluasi Kesenjangan**

Langkah-langkah atau tahap-tahap yang dilalui dalam melakukan evaluasi yang didasarkan atas model evaluasi kesenjangan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pertama: Tahap Penyusunan Desain.

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Merumuskan tujuan program
- b. Menyiapkan siswa, staf dan kelengkapan lain
- c. Merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk pada suatu yang dapat diukur, biasa di dalam langkah ini evaluator berkonsultasi dengan bagian pengembangan program (program developer). Standar yang dimaksud adalah kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan dengan menunjuk pada hasil yang efektif.

#### 2. Kedua: Tahap Penetapan Kelengkapan Program.

Tahap ini hendak melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan

- a. Meninjau kembali penetapan standar
- b. Meninjau program yang sedang berjalan
- c. Meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai.

### 3. Ketiga: Tahap Proses (*Process*)

Dalam tahap ketiga dari evaluasi kesenjangan ini adalah mengadakan evaluasi, tujuan-tujuan manakah yang sudah dicapai. Tahap ini juga disebut tahap “mengumpulkan data dari pelaksanaan program”.

### 4. Keempat: Tahap Pengukuran Tujuan (*Product*)

Yakni tahap mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat output yang diperoleh. Pertanyaan yang diajukan dalam tahap ini adalah, “apakah program sudah mencapai tujuan terminalnya?”

### 5. Kelima: Tahap Perbandingan (*Program Comparison*)

Yaitu tahap membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini evaluator menuliskan semua penemuan kesenjangan atau ketidaksesuaian, untuk disajikan kepada para pengambil keputusan, agar mereka dapat memutuskan kelanjutan dari program tersebut. Kemungkinan yang dapat dilakukan oleh para pengambil keputusan adalah:

- a. Menghentikan program
- b. Mengganti atau merevisi program
- c. Meneruskan program
- d. Memodifikasi tujuan dari program

Kunci dari evaluasi *discrepancy* atau model Provus ini adalah dalam hal membandingkan penampilan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang dimaksud dengan penampilan adalah sumber, prosedur, manajemen dan hasil nyata yang tampak ketika program dilaksanakan.

## **C. IMPLEMENTASI PREDIKTIF MODEL PROVU'S DISCREPANCY**

Penulis meyakini bahwa Provus's DEM ini merupakan salah satu model yang ideal untuk diterapkan di dalam konteks program

Pendidikan Inklusi di Indonesia, atau secara terbatas di Malang. Karena ketika membahas pendidikan inklusi, ada banyak praktek yang membutuhkan kajian lebih mendalam, yang mestinya diawali dengan evaluasi.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga berhak mendapatkan pendidikan”; Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan “setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi ditengah masyarakat.

Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama anak normal (non-ABK) usia sebayanya di kelas biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Menerima ABK di Sekolah Dasar terdekat merupakan mimpi yang indah yang dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus.

Sayangnya, SD Inklusi yang sudah “terlanjur” menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan kebutuhan khusus itu. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen dengan karakteristik ABK dan regular. Guru belum siap

untuk menangani anak-anak dikelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Akhirnya, guru-guru yang berhadapan langsung dengan ABK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode yang sama dan dengan perlakuan yang sama sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi di SD belum beriringan dengan visi pendidikan berdasarkan inklusi yang mengedepankan keragaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kurikulum dan metode pengajaran yang kaku dan sulit diakses oleh ABK masih ditemukan pada kelas inklusi. Pengintegrasian kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru karena kemampuan guru yang terbatas. Guru-guru belum mendapatkan training yang praktikal dan kebanyakan yang diberikan sifatnya hanya sebatas sosialisasi saja. Wali kelas dan atau guru bidang studi yang kedapatan dikelasnya ada ABK masih menunjukkan sikap “terpaksa” dalam mendampingi ABK memahami materi.

Dengan kata lain, apa yang diuraikan di atas merupakan ungkapan-ungkapan yang masih menyatakan ketidakpuasan terhadap praktek pendidikan inklusi. Sepertinya, masih ada kesenjangan antara hal-hal yang ditetapkan sebagai standar pendidikan inklusi dengan praktek-prakteknya. Jika situasi dan konteks pendidikan inklusi dievaluasi dengan menggunakan Provus's DEM, maka akan dapat digambarkan ke dalam kisi-kisi sebagai berikut:

#### D. PROVUS'S DISCREPANCY EVALUATION MODEL PADA PENDIDIKAN INKLUSI

ASPEK EVALUASI	KRITERIA	INDIKATOR KETERCA-PAIAN	TEKNIK EVALUASI	INFORMASI
Outcome (dampak jangka panjang)	Kesetaraan hak dalam bidang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).	Penerimaan dan akses ABK dalam pendidikan formal dan non formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi dokumentasi</li> <li>• Wawancara</li> <li>• Angket</li> <li>• Observasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru</li> <li>• Orang tua ABK</li> <li>• Siswa ABK</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>
Output (dampak langsung)	Sekolah reguler menerima ABK dan memfasilitasi kebutuhan khususnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah sekolah inklusi</li> <li>• Kurikulum yang disesuaikan</li> <li>• Sikap inklusif stakeholder sekolah</li> <li>• Lingkungan aksesibel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru</li> <li>• Orang tua ABK</li> <li>• Siswa ABK</li> </ul>
Proses	Siswa ABK dapat mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan khususnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Individual</li> <li>• Guru pendamping khusus terlatih</li> <li>• Lingkungan Inklusif dan Ramah Pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru</li> <li>• Siswa ABK</li> </ul>
Input	Sekolah Reguler telah memiliki Pedoman dan SOP penerimaan siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Pedoman penerimaan siswa berkebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Guru</li> </ul>

	berkebutuhan khusus, dan telah diimplementasikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• khusus</li> <li>• Dokumen SOP penerimaan siswa berkebutuhan khusus</li> <li>• Catatan proses penerimaan siswa berkebutuhan khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang tua ABK</li> <li>• Siswa ABK</li> <li>• Siswa Reguler</li> </ul>
○ Siswa (raw input)	Siswa memperoleh pendampingan untuk kebutuhan khususnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa dipersiapkan sebelum masuk sekolah reguler.</li> <li>• Guru pendamping khusus tersedia.</li> <li>• Alat peraga dan media pembelajaran yang disesuaikan.</li> <li>• Lingkungan fisik dan non fisik yang aksesibel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru</li> <li>• Siswa ABK</li> </ul>
○ Pendidik	Pendidik reguler yang telah memperoleh pelatihan mengenai pendidikan inklusi dan pendidik yang bertugas secara khusus sebagai Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah guru reguler yang mendapat pelatihan mengenai pendidikan inklusi.</li> <li>• Jumlah guru pendamping khusus dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi dokumentasi</li> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Guru</li> <li>• Siswa ABK</li> </ul>



	Pendamping Khusus.	agenda yang jelas.		
○ Kurikulum (materi, metode, media, dll)	Kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus disertai metode dan media yang kreatif yang dapat mengoptimalkan kemampuan siswa berkebutuhan khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individual Education Plan dengan metode pengajaran yang sesuai.</li> <li>• Media pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi dokumentasi</li> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Guru</li> <li>• Siswa ABK</li> </ul>
○ Sarana prasarana	Gedung yang aksesibel, prasarana yang memenuhi asas kegunaan, kemandirian, kemudahan, dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan ramp.</li> <li>• Toilet yang aksesibel.</li> <li>• Ketersediaan rambu yang mengakomodir kebutuhan ABK.</li> <li>• Pencahayaan kelas dan audio yang jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala sekolah</li> <li>• Guru</li> <li>• Siswa ABK</li> </ul>
○ Tendik	Tenaga kependidikan yang memiliki sikap yang ramah ABK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tendik telah mengikuti pelatihan mengenai pendidikan inklusi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Tenaga kependidikan</li> <li>• Siswa ABK</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lingkungan (ekosospolitik)</li> </ul>	<p>Lingkungan fisik sekitar gedung sekolah yang aksesibel dan lingkungan non fisik (humans) yang bersikap ramah dan inklusif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lingkungan gedung sekolah yang aksesibel.</li> <li>• Sikap yang ramah terhadap ABK oleh staf sekolah, teman sekolah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Tenaga kependidikan</li> <li>• Siswa ABK</li> <li>• Siswa non ABK</li> </ul>
<p>Konteks</p>	<p>Pendidikan Inklusi yang dimaksud adalah sekolah reguler yang menerima siswa berkebutuhan khusus, terutama disabilitas fisik dan indera. Pendidikan inklusi tidak bermaksud untuk mengakhiri pendidikan khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan regulasi pemerintah atas hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.</li> <li>• Pendampingan dan pembinaan dari dinas terkait.</li> <li>• Memperlengkapi sumberdaya sekolah, baik SDM maupun sumberdaya lainnya.</li> <li>• Pembangunan inklusif disabilitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas pendidikan</li> <li>• Kepala Sekolah</li> <li>• Guru dan tenaga kependidikan</li> <li>• Siswa ABK</li> <li>• Siswa non ABK</li> </ul>

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan matriks atau kisi-kisi evaluasi di atas, maka unsur-unsur prinsip dari model evaluasi provus dielaborasi secara keseluruhan.

Pada Tahap pertama mengenai penyusunan desain, telah dirumuskan tujuan program yang meliputi *outcome*, yang merupakan tujuan berdampak tidak langsung namun lebih luas, dan *output* yang merupakan tujuan berdampak langsung pada fokus atau subyek program. Selanjutnya, pada tahap ini dilakukan penyiapan siswa, staf dan kelengkapan lain telah terangkum di dalam unsur *input* yang terdiri dari *siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, lingkungan*. Standar yang berupa rumusan pencapaian target juga telah ditentukan dalam indikator-indikator pencapaian masing-masing komponen.

Pada kedua yakni tahap penetapan kelengkapan program yang melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum, diwadahi di dalam kisi-kisi evaluasi pada bagian indikator ketercapaian dan juga teknik evaluasinya. Tahap ketiga yang menilai *proses* juga telah mendapatkan tempat yang sama dalam kisi-kisi tersebut, sebagai unsur evaluasi. Dalam tahap ketiga yang menilai kesenjangan tersebut mempertanyakan tujuan-tujuan manakah yang sudah dicapai.

Sedangkan pada tahap keempat yang melakukan pengukuran tujuan, ditunjukkan dalam matrik dengan memberikan indikator ketercapaian.

Untuk tahap kelima mengenai perbandingan (*Programme Comparison*), tidaklah lain merupakan hasil evaluasi. Berdasarkan teknik evaluasi yang direncanakan akan dapat dilihat, apakah tujuan yang penetapannya dijabarkan dalam indikator telah sesuai dengan praktek atau fakta yang ditemukan di lapangan.

Dengan demikian *Provus's Discrepancy Evaluation Model* dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atas penerapan pendidikan inklusi. Penggunaan kisi-kisi yang dilakukan diatas adalah salah satu wujud penuangan *Provus's DEM* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasinya, sejauh tahapan-tahapan yang diisyaratkan tidak diabaikan.

**DAFTAR REFERENSI**

1. Daryanto, 2008. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
2. Majid, Abdul., 2009. *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
3. *Jurnal Pendidikan Inklusi* <https://ml.scribd.com/doc/141223454>
4. Rombot, Olifia. [https://pgsd.binus.ac.id/2017/04/10/pendidikan-inklusi/#\\_ftn1](https://pgsd.binus.ac.id/2017/04/10/pendidikan-inklusi/#_ftn1)
5. <https://dnoeng.wordpress.com/tag/langkah-langkah-evaluasi/>
6. <https://suciptoardi.wordpress.com/2011/01/03/evaluasi-program-malcolm-provus-dem-discrepancy-evaluation-model/>
7. <http://edukasi.kompas.com/read/2009/10/21/17303324/baru.8.sd.terapan.pendidikan.inklusif>

\*) *Dosen Psikologi Pendidikan*